

**PENERAPAN *DYNAMIC GOVERNANCE* DI KECAMATAN MARISO**

**KOTA MAKASSAR**

**Disusun Oleh :**

**Muhammad Akbar**

**Nomor Stambuk : 105640153411**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

Penerapan *Dynamic Governance* di Kecamatan Mariso Kota Makassar

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Muhammad Akbar

Nomor Stambuk : 105640153411

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan *Dynamic Governance* Di Kecamatan Mariso  
Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Muhammad Akbar

Nomor Stambuk : 105640153411

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Abdul Kadir Adys, SH,MM**

**Rudi Hardi, S.Sos, M.Si**

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan

**Dr.Hj. Ihyani Malik,S.os,M,si**

**A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Akbar

Nomor Stambuk : 105640153411

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, September 2017

Muhammad Akbar

## Abstrak

**MUHAMMAD AKBAR 105640153411 Penerapan *Dynamic Governance* di Kecamatan Mariso Kota Makassar.** (Dibimbing Oleh. Abdul Kadir Dan Rudi Hardi)

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan *dynamic governance* di Kecamatan Mariso kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *dynamic governance* di Kecamatan Mariso kota Makassar. Dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penerapan *dynamic governance* di Kecamatan Mariso Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian Fenemenologi dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Penerapan *Dinamik Governance* di Kecamatan Mariso Kota Makassar, *Thinking Ahead*, Mengubah Kecamatan Mariso menjadi lebih baik seperti melalui visi-misinya pemerintah kota yang ingin mewujudkan Kecamatan Mariso kota makassar sebagai kota impian yang nyaman untuk semua masyarakatnya, Mampu menyesuaikan diri demi tercapainya tujuan seperti penerapan Smart city, dan lain-lain. *Thinking Again*, Menentukan visi-misi di perlukan satuan perangkat daerah ( SKPD ). Kemampuan mengevaluasi kebijakan seperti melakukan kunjungan kesetiap kecamatan untuk memantau kebijakan yang sedang berlangsung. Meninjau kembali kebijakan dan program inovasi oleh pemerintah. Faktor yang mempengaruhi Penerapan *Dinamic Governance* Di Kecamatan Mariso Kota Makassar. SDM yaitu satuan perangkat daerah, Kurangnya partisipasi dalam menjalankan setiap program-program inovasi pemerintah.

Kata kunci: Penerapan *Dynamic, Governance*,

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang menentukan setiap makhlukNya dan memberikan bimbinganNya. Dengan segala nikmat dan kesempatan yang tercurahkan sehingga menjadi sempurna segala amal saleh yang kita lakukan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, pemimpin para rasul dan imam dari orang-orang yang bertaqwa, karena dengan perjuangannya kita bisa mengenal agama yang sempurna, mulia dan penuh cahaya ini, Islam. Dengan segala waktu dan kesehatan yang diberikan olehNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan menuliskan hasil penelitian ini dalam suatu karya ilmiah, yaitu skripsi.

Skripsi yang berjudul “ **Penerapan *Dynamic Governance* Di Kecamatan Mariso Kota Makassar**” Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai rintangan dan hambatan yang datang silih berganti. Namun, berkat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga semua rintangan dan hambatan dapat diatasi.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini penulis secara khusus menyampaikan terima kasih yang tak berhingga kepada yang terhormat Ayahanda dan Ibunda tersayang atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis sejak dalam kandungan sampai sekarang ini. Atas segala didikan, tenaga, materi, kasih sayang yang berlimpah dan doa restunya serta ucapan terima kasih

kepada Bapak Abdul Kadir Adys, SH,MM selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim,SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr.Hj.Ihyani Malik, S.os,M.si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak A.Luhur Prianto S.Ip, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Suluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan atas ilmu serta nasehat-nasehatnya.
5. Sahabat-sahabatku angkatan 2011 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan dan kawan-kawan angkatan 2011 yang selalu menemani, merasakan suka duka penyusunan skripsi dan membantu serta kawan-kawan yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita sama-sama meraih kesuksesan serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Walikota Makassar, beserta staff kantor terima kasih telah memberikan kemudahan dalam mencari data.

Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan semaksimal mungkin

Dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun karna penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Amin.

Makassar, September 2017

Muhammad Akbar

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Dynamic Governance .....	7
B. Konsep Implementasi Kebijakan .....	19
C. Kerangka Pikir .....	27
D. Fokus Penelitian .....	28
E. Deskripsi Fokus Penelitian .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi.....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik analisis Data .....	32
G. Keabsahan Data .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Karakteristik Keadaan Geografis Objek Penelitian .....	35
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
C. Faktor yang mempengaruhi .....	52

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
-----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah daerah saat ini dituntut untuk melakukan pembaharuan diberbagai sektor sebagai suatu langkah untuk mengatasi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Inovasi menjadi suatu keharusan yang mesti dilakukan agar keberadaan pemerintah menjadi bermakna di mata rakyatnya (van Vierlo, 1996). Inovasi tidak hanya penting untuk meningkatkan pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah (Nutt and Backoff, 1993; Miller and Friesen, 1983; Osborne and Gaebler, 1992). Keberadaan pemerintah daerah di mana pun juga adalah dimaksudkan untuk menghasilkan output. Output penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah adalah berupa percepatan kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu inovasi kelembagaan atau inovasi dalam bidang organisasi menjadi penting dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah (Fadel Muhammad : 2004).

*Dynamic governance* di Negara maju dan demokratis sudah merupakan bagian yang integral dari sistem pemerintahan Negara yang bersangkutan. Sedangkan, di Negara yang berkembang *dynamic governance* tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari upaya kepemimpinan yang memiliki kapabilitas untuk membangun suatu bangsa yang maju agar mampu bertahan hidup dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Kapabilitas adalah pola pikiran dan cara kerja yang terbentuk

dalam waktu yang lama melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, Boon Siong Neo dan Geraldine Chen (2007 : 29-46) mengatakan bahwa : *capabilities* terdiri dari tiga unsur yaitu: (1) *thinking ahead* yaitu kemampuan untuk menangkap peranda awal tentang arah perkembangan situasi yang dapat mempengaruhi peranan dan keberadaan suatu Negara, memampukan untuk menentukan visi dan misi yang tepat. (2) *thinking again* yaitu kemampuan dan kemauan untuk menata dan mengevaluasi kebijakan yang sedang berlaku agar bisa lebih baik kinerjanya. (3) *thinking across* yaitu kemampuan melakukan tolak banding (*beanchmarking*) dan keterbukaan untuk melintasi batas agar dapat belajar dari pengalaman orang lain supaya dapat memperkenalkan ide dan konsep baru kedalam lembaga yang dipimpinya. Kapabilitas *dynamic governance* perlu dimiliki oleh semua pelaku yang terlibat dalam proses pembangunan nasional terutama bagi mereka yang berperan sebagai pemimpin perubahan.

Salah satu Negara yang berhasil menerapkan *dynamic governance* adalah Negara Singapura. Model yang diterapkan oleh Singapura dalam mereformasi pemerintahannya mampu menginspirasi Negara-negara lain dengan konteks social politik berbeda dalam mencapai cita-cita pemerintahan ideal. Untuk model pendekatan *dynamic governance* yang telah berhasil diterapkan di Singapura dalam mencapai *good governance* akhirnya mewarnai perkembangan metode dan sistem bagaimana seharusnya sektor politik diselenggarakan dengan baik.

*Dynamic governance* bukan suatu konsep yang terpisah dari *good governance*. Berangkat dari pemahaman *good governance* maka singapura mengembangkan *dynamic governance* yang dirasa sesuai dengan kultur dan

pengalaman Negara tersebut. Pemerintah Singapura menyadari *good governance* sangat penting karena menciptakan konteks dan kondisi yang ideal bagi masyarakat. *Good governance* menjadi sebuah tantangan ditengah dinamik globalisasi dan berupaya menampung aspirasi rakyat. Tuan akhirnya pun ingin meningkatkan taraf dan kualitas hidup orang. Namun, prinsip-prinsip yang diajukan dalam *good governance* tidak cukup untuk mencapai kondisi ideal Negara. Neo Boon Siong, akademisi dari NTU ( Nanyang Technological University) mengatakan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan, kebijakan-kebijakan, kualitas kepemimpinan, institusi dan stabilitas politik berdasarkan *good governance* akan sulit mencapai pelayanan sektor publik yang memuaskan.

Terpaku pada keberhasilan penerapan *good governance* hanya akan merefleksikan keadaan dimasa lalu dan tidak relevan menjawab tantangan dan perubahan dimasa depan.untuk itu (Boon Siong Neo. 2007) merumuskan sebuah konsep pemikiran yang dinamakan *dynamic governance* sebagai pelengkap kunci keberhasilan di Singapura. Menurut: (Boon Siong Neo,2007) mengingatkan sukses *dynamic governance* bukanlah resep tunggal bagi Negara sebesar Indonesia. Namun *dynamic governance* sangat mungkin diterapkan di tingkat kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia. Jika di Negara Singapura mampu menerapka *dynamic governance* mengapa tidak di Indonesia model penerpan *dynamic governance* itu dilakukan.

Terbukti sudah ada 3 (tiga) contoh daerah yang telah menggunakan pendekatan *dynamic governance* menurut : (Boon Siong Neo, Geraldine Chen 2007) yaitu:

1. Jusuf S.K mengubah Kota Tarakan menjadi pusat jasa perdagangan serta membatasi eksploitasi sumberdaya alam di Kota Tarakan. Walikota Jusuf S.K merujuk pembangunan yang dilakukan oleh Singapura sebagai *role model* pembangunan Kota Tarakan.
2. Kabupaten Jemberna dibawah kepemimpinan I Gede Winasa yang mendapat label kabupaten termiskin di pulau Bali mampu memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis kepada masyarakat melalui program efisiensi dan inovasi.
3. Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharani menjadi kota indah dengan taman-taman yang berkelas dunia dan pelayanan publik yang baik.

Melihat keberhasilan ke-3 (tiga) daerah diatas merupakan contoh keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerahnya sekaligus membuktikan bahwa *dynamic governance* tidak terjadi secara kebetulan, namun merupakan hasil dari kesungguhan hasil niat dan ambisi kepala daerah dalam interaksi sosial ekonomi untuk meraih tujuan yang dikehendaki. Jika ketiga daerah diatas mampu menerapkan pendekatan *dynamic governance* mengapa tidak Kota Makassar juga memberlakukan pendekatan tersebut. Sehingga mampu membawa kota Makassar menjadi salah satu contoh kota yang pembangunan daerahnya sudah maju dan berkembang.

Penerapan *dynamic governance* di Kecamatan Mariso kota Makassar telah diterapkannya sejak 3 tahun yang lalu, terbukti melalui berbagai program inovasi-inovasi pemerintah kota Makassar mulai dari penerapan *Smart City*,

*Smart Card*, dan penerapan Makassar tidak rantasa melalui programnya yaitu LISA (liat sampah ambil) serta masih banyak lagi program-program inovasi yang lainnya. Melihat banyaknya permasalahan yang ada di kota Makassar mulai dari masalah kebersihan kota, penataan kota, serta masalah sampah yang gencar dilakukan oleh pemerintah untuk itu membuat pemerintah harus inovatif dalam menciptakan berbagai macam inovasi, demi terlaksananya visi-misi pemerintah yang ingin menjadikan kota Makassar sebagai “Kota Dunia Nyaman untuk semua”. Berdasarkan masalah yang di hadapi oleh kota Makassar maka perlu di terapkan pendekatan *dynamic governance* yang dimana terdapat didalamnya 3 (tiga) unsur penting yaitu: (1) *Thinking ahead* yaitu kemampuan untuk menentukan visi dan misi yang tepat. (2) *Thinking again* yaitu kemampuan dan kemauan untuk menata mengevaluasi kebijakan yang sedang berlaku agar bisa lebih baik kinerjanya. Berdasarkan kedua indikator diatas tersebut peneliti ingin mengukur tingkat keberhasilan dari penerapan *Dynamic Governance* maka peneliti tertarik mengambil judul tentang “ **Penerapan *Dynamic Governance* Di Kecamatan Mariso Kota Makassar.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas, maka peneliti ini berusaha seoptimal mungkin untuk mengkaji masalah dengan batasan:

1. Bagaimana penerapan *Dynamik Governance yang meliputi Thinkin Ahead dan Thinkin Again* Di Kecamatan Mariso Kota Makasssar.?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi *Dynamik Governance* Di Kecamatan Mariso Kota Makassar.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang dicapai dalam penyusunan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Dynamik Governance* Di Kecamatan Mariso Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memmpengaruhi *Dynamik Governance* Di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang ilmu pemerintahan, khususnya hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan tentang manfaat dari indicator diatas tersebut maka peneliti tertarik mengambil judul tentang Penerapan *Dynamic Governance* Di Kecamatan Mariso Kota Makassar.
2. Merupakan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu pemerintahan Khususnya indicator diatas tersebut maka peneliti tertarik mengambil judul tentang Penerapan *Dynamic Governance* Di Kecamatan Mariso Kota Makassar

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Dynamic Governance

##### 1. Pengertian Dynamic Governance

Istilah *governance* telah lama kita kenal yaitu menunjuk pada hubungan antara pemerintah / negara dengan warganya sehingga memungkinkan berbagai kebijakan dan program dapat di rumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Kaufmann, Kraay dan Mastruzzi (2004) mengatakan "*Governance is the relationship between governments and citizens that enable public policies and programs to be formulated, implemented and evaluated. In the broader context, it refers to the rules, institutions, and networks that determine how a country or an organization functions*" Governance / pemerintahan adalah hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya yang memungkinkan berbagai kebijakan publik dan program dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi.

Dalam konteks lebih luas menunjuk pada sejumlah aturan, institusi, dan jaringan yang menentukan berfungsinya suatu negara atau organisasi). Sedang dari perspektif sektor publik (Andrew, 2004) memaknai *Governance* sebagai "*the manner in which the government, working together with other stakeholders in society, exercises its authority and influence in promoting the collective welfare of society and the long-terms interested of the nation*" (Cara dimana pemerintah bekerjasama

dengan pemangku kepentingan lain dalam masyarakat, menerapkan kewenangan dan mempengaruhi dalam mengusahakan kesejahteraan masyarakat dan tujuan jangka panjang dari suatu bangsa).

Menyangkut penentuan cara pemerintah mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan jangka panjang dari suatu bangsa, maka pada negara demokratis cara yang ditempuh adalah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, penetapan institusi dan pola hubungan antar pemangku kepentingan. Terkait dengan pemahaman tersebut, Boon, dan Geraldine (2007 : 52 ) memaknai *Governance* sebagai “ *the choosen path, policies, institutions and the resultant structures that collectively provide the incentives and constraints to facilitate or impede interactions that lead to economic progress and social wellbeing*” (penentuan berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang dipilih, yang secara bersama mendorong untuk memudahkan interaksi kearah kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial lebih baik).

Menurut Boon dan Geraldine (2007) merumuskan *Dynamic Governance* sebagai “*to how these choosen paths, policies, institutions, and structures adapt to an uncertain and fast changing envinronment so that they remain relevant and efektif in achieving the long-term desired outcomes of society*”(bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan

ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang cepat sehingga kebijakan, institusi dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat).

Bertitik tolak pemahaman tersebut di atas, maka konsep operasional dari *Governance*(keperintahan) adalah cara yang ditempuh pemerintah suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan bagi pencapaiantujuan negara. Dalam kaitannya dengan cara menjalankan roda pemerintahan, di samping kita mengenal adanya azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam *good governance* (disebut *good governance* karena pemerintah melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan), Bank Dunia (dalam *World Bank Economics Review*, vol 18, 2002) juga merekomendasikan perlunya memperhatikan 6 (enam) dimensi dari *governance* yaitu:

1. Kebebasan dan akuntabilitas – perluasan peranserta masyarakat dalam memilih penyelenggara pemerintahan, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan pers;
2. Stabilitas politik dan tidak ada lagi kekerasan – tidak ada lagi pergantian pemerintahan lewat kekerasan, secara tidak konstitusional dan memerangi terorisme;
3. Pemerintahan yang efektif – pelayanan publik yang berkualitas oleh aparatur pemerintah yang bebas dari tekanan politik, komitmen pemerintah untuk membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan yang berkualitas;

4. Aturan perundang-undangan yang berkualitas – kemampuan pemerintah untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan (perundang-undangan) yang mendorong peran swasta dalam pembangunan;
5. Penegakan hukum – meyakinkan berbagai pihak bahwa aturan hukum akan dipatuhi, terutama keberlangsungan kontrak-kontrak yang telah disepakati, demikian juga polisi, jaksa dapat menegakkan hukum secara adil; dan
6. Pengendalian atau penghapusan korupsi.

Sedangkan konsep operasional dari *Dynamic Governance* adalah kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

## **2. Elemen dan Sistem Dynamic Governance**

Perubahan merupakan esensi dasar dalam *dynamic governance* karena untuk dapat menyesuaikan cara yang ditempuh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan dinamika perubahan lingkungan diperlukan berbagai perubahan baik dari aspek rencana maupun implementasinya. Rencana dan implementasi harus adaptif dengan besar kecilnya ketidakmenentuan masa depan lingkungan global. Perubahan umumnya merupakan hasil perpaduan dari dua unsur yaitu; budaya (budaya organisasi pemerintah) dan kemampuan (organisasi pemerintah).

Terkait dengan perubahan sebagai esensi dasar dynamic governance, maka dua elemen dari dynamic governance menurut Boon, dan Geraldine (2007 : 12-46) adalah

1. Pertama merupakan budaya organisasi pemerintah meliputi; *integrity* (integritas), *incorruptibility* (tidak dapat disuap/tidak korupsi), *meritocracy* (berdasar bakat & kemampuan/prestasi), *market* (orientasi pasar yang berkeadilan), *pragmatism* (mudah menyesuaikan/ lebih berorientasi pada pencapaian tujuan negara daripada berkuat soal ideologi), *multi-racialism* (berbagai etnik dan kepercayaan), termasuk juga dalam budaya adalah ; aktivitas negara (*state activism*), rencana dan tujuan jangka panjang (*long term*), kebijakan yang sesuai kehendak masyarakat (*relevance*), pertumbuhan (*growth*), stabilitas (*stability*), bijaksana (*prudence*), dan mandiri (*self-reliance*);
2. Kedua, kemampuan yang dinamis meliputi: *thinking ahead* (berpikir ke depan), *thinking again* (mengkaji ulang), dan *thinking across* (belajar dari pengalaman negara / organisasi lain). Kedua elemen pokok di atas ditopang oleh *able people* dan *agile processes* (orang yang berkemampuan dan dilakukan dengan proses yang baik), serta dipengaruhi oleh *future uncertainties and external practise* (ketidakpastian masa mendatang dan praktek/kebiasaan negara atau organisasi lain). Kerangka dasar elemen-elemen di atas digambarkan sebagai berikut:



memahami dampaknya terhadap sosial-ekonomi masyarakat, mengidentifikasi pilihan-pilihan investasi yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan kesempatan baru dan menghindari potensi ancaman yang dapat menghambat kemajuan masyarakat. Berfikir ke depan ini akan mendorong institusi pemerintah untuk menilai dan meninjau kembali kebijakan dan strategi sedang berjalan, memperbaharui target dan tujuan, dan menyusun konsep baru kebijakan yang dipersiapkan menyongsong masa depan.

Berpikir ke depan bukan sekedar meramalkan masa depan yang penuh ketidakpastian dan sekedar membuat perencanaan formal tetapi lebih dari itu adalah mengajak orang untuk berfikir strategis sehingga mereka dapat melihat kegiatan pembangunan masa depan yang lebih masuk akal, berbeda dengan apa yang mereka angankan Lewis, Carol W and Stuart C. Gilman (2005). Oleh karena meninjau masa depan merupakan latihan berfikir untuk menggali sinyal-sinyal yang akan menghampiri / datang, sehingga menjadikan kita peka terhadap kemungkinan hambatan yang akan kita lalui di masa depan.

Proses berpikir ke depan atau meninjau masa depan ini meliputi :

1. Menggali berbagai kemungkinan dan antisipasi terhadap berbagai kecenderungan masa depan yang memiliki dampak signifikan terhadap tujuan kebijakan;
2. Merasakan dampak pembangunan terhadap pencapaian tujuan pembangunan sedang berjalan, dan menguji efektivitas kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan;

3. Menentukan pilihan-pilihan yang akan digunakan sebagai persiapan menghadapi timbulnya ancaman terhadap peluang yang baru; dan
4. Mempengaruhi para pembuat kebijakan kunci dan para pemangku kepentingan untuk memperhatikan isu-isu yang muncul secara serius dan mengajak mereka untuk membicarakan kemungkinan respon/ tanggapan yang akan diambil.

Kedua *Thinking Again* merupakan kemampuan meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan. Apakah hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi, dan program telah memenuhi harapan banyak pihak atau perlu didesain ulang untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik. Kerangka waktu melakukan kaji ulang mulai dari kondisi yang sekarang dihadapi sampai masa waktu berlakunya kebijakan, strategi, dan program, dengan membandingkan apa yang dicapai dengan apa yang diinginkan. Kaji ulang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah terjadi mencakup pemanfaatan data, informasi-informasi baru, ukuran /standar yg telah ditentukan, warisan masalah dari suatu kebijakan atau program, dan umpan balik yang diterima.

Kaji ulang dimaksudkan untuk melihat kelaikan dan kecocokan kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan dengan kondisi sedang dihadapi dan masa mendatang akibat perubahan lingkungan global yang cepat.

Proses memikirkan kembali / kaji ulang meliputi:

1. Menganalisis dan meninjau kinerja terakhir berdasarkan umpan balik masyarakat;
2. Mencari penyebab mendasar tercapai atau tidak tercapainya sebuah target;

3. Meninjau kembali kebijakan, strategi, dan program untuk mengidentifikasi faktor-faktor menonjol penyebab keberhasilan dan kegagalan;
4. Mendisain kembali kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya sehingga kinerja dapat diperbaiki dan tujuan tercapai secara lebih baik; dan
5. Menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga masyarakat dan pelanggan menikmati pelayanan dan outcome lebih baik.

Ketiga *Thinking Across* merupakan kemampuan untuk mengadopsi pikiran, pendapat, ide-ide lain di luar kerangka berpikir (*mindset*) yang secara tradisional telah melekat dan menjadi dasar melakukan sesuatu. Dengan belajar dari pengalaman dan pemikiran orang lain dalam mengelola sebuah negara atau pemerintahan akan didapat ide-ide dan pemikiran segar dalam melakukan inovasi bagi perbaikan kebijakan, strategi, dan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Falsafah dasar dalam *thinking across* ini adalah *present-outside, future-inside* yang dapat dimaknai saat ini pikiran-pikiran brilian, kebijakan, strategi dan program yang baik-baik masih menjadi milik negara atau organisasi lain tetapi ke depan akan menjadi milik kita. Belajar dari pihak lain bukan sekedar teknis operasional, tetapi lebih penting dari itu adalah menyangkut mengapa pihak lain dapat menyelesaikan masalah yang sama dengan cara berbeda, bagaimana mereka mendisain suatu kebijakan atau program sesuai dengan karakteristik kemajuan masyarakat setempat, dan lain-lain yang bersifat inovatif dan kreatif.

Proses *thinking across* ini meliputi:

1. Mencari dan menemukan praktek-praktek implementasi suatu kegiatan/ program yang kurang lebih sama/ memiliki kemiripan;
2. Refleksikan atau gambarkan tentang apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukan, ambil pelajaran dari pengalaman yang mereka lakukan;
3. Evaluasi apa yang dapat diterapkan pada kontek lokal (tempat kerja, masyarakat setempat/lokal), pertimbangkan hal-hal dan kondisi unik yang mungkin dapat diterima masyarakat lokal;
4. Ungkapkan hubungan antara ide-ide baru atau kombinasikan ide-ide berbeda yang dapat menciptakan pendekatan yang inovatif terhadap isu-isu yang muncul; dan
5. Sesuaikan kebijakan dan program dengan kebutuhan setempat/lokal.

Proses berpikir ke depan, berpikir ulang, dan berpikir ke luar dari mindset yang sudah terbentuk merupakan proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh pemerintah karena: a) Pertama, untuk memahami pengaruh dari masa`depan terhadap perkembangan dalam negeri sehingga dapat dipersiapkan suatu kebijakan yang memungkinkan warganya mengatasi masalah yang akan dihadapi. b) Kedua, Kerusakan lingkungan fisik dan non fisik akan berdampak pada mandulnya kebijakan meskipun telah dibuat sebaik dan seteliti mungkin. Oleh karena itu proses peninjauan ulang (*thinking again*) perlu dilakukan untuk menilai apakah kebijakan tersebut masih relevan dengan agenda nasional atau tujuan jangka panjang. c) Ketiga, dalam pemikiran baru tentang ekonomi, untuk tetap

bertahan memerlukan pembelajaran dan inovasi untuk menghadapi tantangan baru sehingga tercipta berbagai kesempatan dan peluang. Untuk itu pemerintah perlu melihat perkembangan negara lain agar dapat diterapkan di dalam negeri.

Pada gambar 1 di atas tampak bahwa kemampuan untuk melakukan *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* harus didukung oleh orang yang memiliki kemampuan (*able people*) dan harus dilakukan dengan proses yang baik/benar (*agile processes*). Orang yang berkemampuan artinya adalah orang-orang yang dapat atau mampu membaca masa depan yang akan menghampiri berdasarkan fakta, gejala dan perkembangan masa kini ditambah proyeksi akibat perubahan global yang cepat. Orang berkemampuan juga bermakna orang yang memiliki kewenangan, karena banyak orang memiliki kemampuan seperti disebut di atas tetapi tidak memiliki kesempatan dan kewenangan (kewenangan formal / kewenangan akademik). Kewenangan formal terkait dengan jabatan / posisi seseorang secara struktural, dan kewenangan akademik terkait dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki. *Agile processes* berkaitan dengan cara, mekanisme atau prosedur yang benar dalam melakukan *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*, cara yang benar dimaksud adalah berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah tidak tercampur dengan kehendak pribadi atau terkontaminasi keinginan politik kelompok tertentu atau sekedar formalitas untuk menghabiskan anggaran.

*Thinking ahead* dipengaruhi secara tidak langsung oleh masa depan yang tidak menentu (*future uncertainties*) yang dapat terjadi karena instabilitas socio-ekonomi, politik maupun karena terorisme dan bencana alam. Ketidakmenentuan

masa depan ini akan memberi wawasan (*insight*) bagi pencarian kebijakan yang cocok (*fit*) untuk membangun sebuah konsep (*conceptualize*) baru dalam mengadopsi suatu kebijakan yang adaptif (*adaptive policies*). Demikian juga dengan *thinking across* secara tidak langsung dipengaruhi oleh praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan (*external practices*) negara lain, dan akan melahirkan ide-ide/pemikiran (*ideas*) baru yang didapat melalui pertukaran pengalaman (*trade-offs*) dan pada gilirannya *thinking across* akan membudaya pada setiap pembuatan kebijakan yang adaptif.

Hal lain lain memiliki pengaruh mendasar dalam *dynamic governance* adalah budaya, yang meliputi prinsip, semangat tidak korup, orientasi pasar, pragmatis, multi-etnik dan kepercayaan, berorientasi jangka panjang, keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat, pertumbuhan (ekonomi), stabilitas, Kebijaksanaan dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa, serta kemandirian, yang semuanya mempengaruhi dan melahirkan tiga kemungkinan yaitu: menghambat (*constraints*), bertentangan (*confronts*), dan menghubungkan /penghubung (*catalyzes*). Dalam praktek pada banyak negara terdapat sebagian atau seluruh budaya menghambat, bertentangan atau penghubung (mendukung) proses *dynamic governance*.

Selanjutnya, kebijakan budaya nusantara juga mengajarkan hal serupa dalam *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* yang dalam ajaran jawa, sebagai salah satu kultur dominan di Indonesia, mengenal adanya filosofi mulat sarira hangrasa wani dan bisaa rumangsa yang berarti berani bertindak dan mawas diri serta mampu memahami situasi serta dinamika yang terjadi.

Kebijakan yang diputuskan untuk diadopsi sebagai hasil proses *thinking ahead, thinking again, dan thinking across* selanjutnya diimplementasikan sebagai semangat pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Governance*).

## **B. Konsep Implementasi Kebijakan**

### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Menurut Webster's yang berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*", *to fill in*", yang artinya mengisi penuh;melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to full*" yaitu mengisi. Selanjutnya kata "*to implement*" mengandung tiga arti sebagai : (1). Membawa ke sesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan; (2). Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan yang bersifat praktis terhadap sesuatu; (3) menyediakan atau melengkapi dengan alat. Kemudian, Tachjan(2003 : 64) mengatakan implementasi kebijakan publik "merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui". Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi.

Metter dan Horn dalam Nugroho(2003 : 169-170) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Metter

dan Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan**

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Nugroho (2003), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
- b. tersedia waktu dan sumber daya;
- c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
- d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
- e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- i. komunikasi dan koordinasi yang baik;

Menurut Grindle dalam Wibawa (1994 : 64) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan,

kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Mazmanian dan Sebatier mengklafikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. *Pertama*, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasidengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial dan ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukuangan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

*Ketiga*, variable dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/ badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Menurut Hogwood dan Gunn, dalam Wahab (1997 : 70-81) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Lembaga/badan pelaksana ;
2. tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu;
3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan;
4. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang andal;
5. Hubungan sebab akibat yang terjadi satu dengan yang lain;
6. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
7. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
9. komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
10. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut teori George C. Edwards III dalam Subarsono (2005 : 90-92), Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Komunikasi

Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut akan berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial

### 3. Disposisi

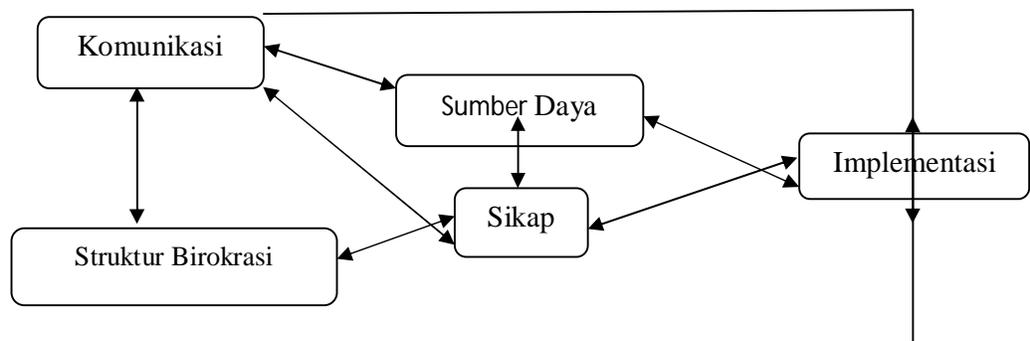
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang telah panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

**Gambar 1.1**

**Model Implementasi Menurut G. C. Edward III**



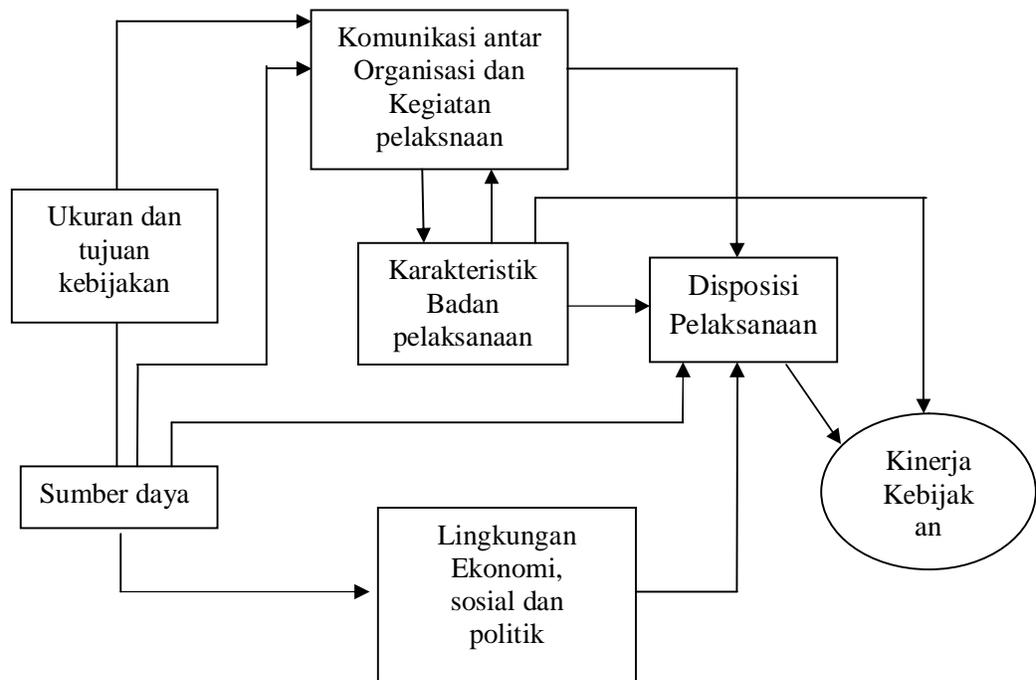
Adapun Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2005 : 42) menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- a. Standar dan sasaran kebijakan;
- b. Sumberdaya;
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- d. Karakteristik agen pelaksana;
- e. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Model implementasi kebijakan dari Van Matter dan Van Horn dapat dilihat dalam gambar berikut:

**Gambar 1. 2**

**Model Implementasi Kebijakan Van Matter dan Van Horn**



Sedangkan G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono (2005 : 101) menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu program, yaitu :

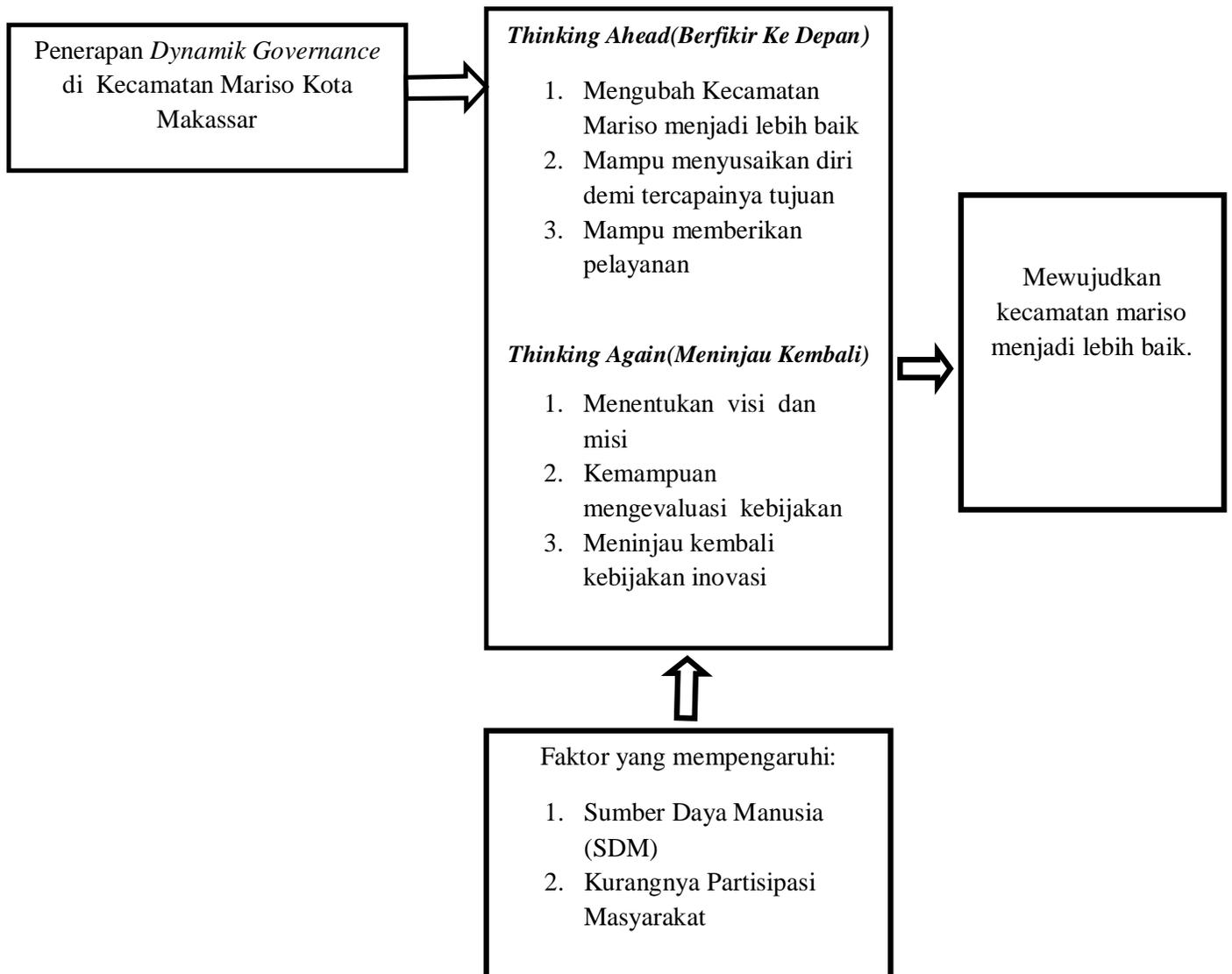
1. Kondisi lingkungan yang terdiri dari : Tipe system Pol ; Struktur kebijakan ; karakteristik struktur politik lokal; kendala sumberdaya; sosial *cultural*; Derajat keterlibatan para penerima program; Tersedianya infrastruktur fisik yg cukup.
2. Hubungan antar organisasi terdiri dari : Kejelasan & konsistensi sasaran program; Pembagian fungsi antar instansi yg pantas; Standardisasi prosedur perencanaan, anggaran,; implementasi & evaluasi; Ketepatan, konsistensi & kualitas komunikasi antar instansi; Efektivitas jejaring untuk mendukung program.
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program; control terhadap sumber dana; keseimbangan antara pembagian anggaran & kegiatan program; Ketepatan alokasi anggaran; pendapatan yg cukup utk pengeluaran; Dukungan pemimpin politik pusat dukungan pemimpin politik lokal; komitmen birokrasi.
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana antara lain : Ketrampilan teknis, manajerial & politis petugas; Kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol & mengintegrasikan keputusan.; Dukungan & sumberdaya instansi; Sifat komisi internal; Hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran; Hubungan instansi dengan pihak diluar pemerintah & NGO; Kualitas pemimpin instansi yg bersangkutan;

komitmen petugas terhadap program kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi.

### **C. Kerangka Pikir.**

*Dynamic Governance* merupakan suatu konsep untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi suatu pemerintahan / organisasi agar tetap hidup (*survive*) menghadapi perubahan global yang cepat dan tidak menentu. Organisasi pemerintah / organisasi lainnya tidak boleh statis, keberhasilan kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan atau masa lampau tidak menjamin kesuksesan masa depan. Oleh karena yang telah dijelaskan oleh Boon dan Geraldine (2007) menurutnya diperlukan semangat/ dinamika untuk selalu menyesuaikan kebijakan, strategi, dan program dengan perkembangan masa depan melalui *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*.

### Bagan kerangka pikir



#### D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian tentang penerpan dinamika *governance* di Kecamatan Mariso kota Makassar yang meliputi *thinking ahead*, dan *thinking again*,.Dan faktor yang mempengaruhi dalam penerpan dinamika *governance* di kota Makassar

#### E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Dinamik Governance yang dimaksud adalah penerapan budaya dan kemampuan pemerintah.
2. Pertama *Thinking Ahead* merupakan kemampuan mengidentifikasi faktor lingkungan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang, memahami dampaknya terhadap sosioi-ekonomi masyarakat, mengidentifikasi pilihan-pilihan investasi yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan kesempatan baru dan menghindari potensi ancaman yang dapat menghambat kemajuan masyarakat.
  - a. Mengubah Kecamatan Mariso menjadi lebih baik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah Kecamatan Mariso kota Makassar dalam mewujudkan visi-misinya menjadikan Kecamatan Mariso sebagai kecamatan yang bebas dari masalah.
  - b. Mampu menyesuaikan diri demi tercapainya tujuan yang dimaksud disini adalah terkait mampukah pemerintah menyesuaikan diri melalui

program-program layanan yang diberikan demi tercapainya tujuan yang diharapkan,

- c. Mampu memberikan pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pemerintah kota memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Makassar dengan maksimal.
3. *Thinking Again* merupakan kemampuan meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan.
- a. Menentukan visi dan misi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya dan cara pemerintah Kecamatan Mariso kota Makassar mampu mewujudkan visi-misinya.
  - b. Kemampuan mengevaluasi kebijakan yang dimaksud adalah bagaimana cara pemerintah Kecamatan Mariso kota Makassar mengevaluasi setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.
  - c. Meninjau kembali kebijakan inovasi yang dimaksud adalah sesuaikah setiap inovasi yang diterapkan oleh pemerintah kota Makassar berjalan dengan baik.
4. Faktor yang mempengaruhi dalam Penerapan *Dynamik Governance* di Kecamatan Mariso Kota Makassar yaitu Sumberdaya Manusianya.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan mulai dari bulan April sampai Juni 2017. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Balaikota Makassar dan di Kecamatan Mariso dengan pertimbangan bahwa peneliti dapat memperoleh data sejauh mana penerapan dinamika governance telah dilakukan di kota Makassar

##### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial (Singarimbun dan Effendi, 1989) dan bersifat survey yakni pengambilan data melalui survey langsung kelapangan sebagai lokasi penelitian.

###### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi dilapangan pada masing-masing variable objek penelitian serta menarik kesimpulan mengenai apa yang hendak diperoleh dari penelitian ini. Kemudian peneliti akan mendeskripsikan dan menjelaskan secara jelas.

### C. Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan, atau tempat penelitian. Sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengamati dan mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang penerapan dinamika governance di kota Makassar. Dengan mewawancarai setiap orang yang terkait dalam penelitian ini serta membagikan kuesioner.
2. Data sekunder ialah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan sumber-sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat, buku harian, notula rapat perkumpulan sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

### D. Informan Penelitian

Sebelum informan dipilih penelitian terlebih dahulu dilakukan observasi informan dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Jumlah informan sebanyak 7 orang dengan rincian sebagai berikut:

	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
	H. Sabri	H. S	Asisten pemerintahan balaikota	1 orang

				g
	Ahmad Kafrawi	A. K	Kepala Dinas Tata Ruang	1
	Harum Rani	H. R	Camat Mariso	1
	Bachtiar dg Matu	B. M	Ketua RT	1
	S y a m s u l	S.L	Masyarakat Mariso	1
	Rani	R	Masyarakat Mariso	1
<b>Total informan</b>				<b>6</b>

### E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Pengamatan/observasi

Pengamatan/observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati objek yang akan diteliti dan kemudian dianalisis secara seksama. Pengamatan peneliti dilakukan terhadap pemerintah daerah kota Makassar.

## 2. Wawancara

Dalam wawancara, peneliti menggali sebanyak mungkin data yang terkait dengan masalah subyek. Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penerapan dinamika governance di kota Makassar.

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, dokumen, atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti yaitu menyangkut penerapan dinamika governance di kota Makassar.

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan dan Biklen analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Proses-proses analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

- b) Penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).  
Dari proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Jika penelitian masih berlangsung, maka setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis data berdasarkan pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi yang ada. Metode Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamat

## **G. Keabsahan Data**

Validitas data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik unyuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

- a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber lain yang telah diperoleh sebelumnya.

b. Triangulasi metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidak akuratannya.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu yang dilakukan disini dengan menguji kredibilitas data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda.



berjumlah kurang lebih 175,77 Km<sup>2</sup> daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km<sup>2</sup>. Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamat-an tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur dengan kabupaten Maros, sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah barat dengan Selat Makassar. Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai home base pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis - Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar

dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.

## **2. Jumlah Penduduk Kota Makassar.**

Jumlah penduduk Kota Makassar berjumlah +1,16 juta jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3,85 juta dan perempuan 4,04 juta. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 1996 sebesar 1,14 persen per tahun. Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 62,35 persen merupakan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Tingkat pendidikan masyarakat semakin meningkat kualitasnya, sejalan dengan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah serta semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Jumlah penduduk tidak tamat SD sebanyak 23,99 persen dari jumlah penduduk 10 tahun ke atas. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 1996 yang mencapai 27,02 persen. Pada pihak lain jumlah penduduk yang tamat pendidikan menengah dan tinggi mengalami peningkatan. Tingkat pendidikan SLTP meningkat dari 11,88 persen menjadi 13,82 persen. Demikian pula pada tingkat pendidikan menengah atas meningkat dari 14,07 persen menjadi 16,29 persen pada periode waktu yang sama. Untuk tingkat pendidikan Tinggi atau Universitas, meskipun proporsinya masih kecil, tapi menunjukkan peningkatan menjadi 2,27 persen. Suku Penduduk Kota Makassar secara umum terdiri dari 2 suku, yakni suku Bugis dan suku Makassar, dimana suku yang dominan di Kota Makassar yakni suku Makassar.

Mata Pencaharian. Wilayah Kota Makassar yang berbatasan dengan perairan selat Makassar dan termasuk kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Kota merupakan Nelayan dan pegawai.

## **2. Visi dan Misi**

### **Visi-Misi Pasangan Dia Mewujudkan Makassar Kota Dunia**

Makassar (Antara Sulsel) - Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal (Dia) Mengangkat Visi-Misi dan isu Strategis dengan mewujudkan Makassar sebagai kota dunia yang nyaman untuk semua. secara geografis kota Makassar sangat strategis dan potensial untuk maju dan dikembangkan menjadi kota yang setara dengan kota moderen yang ada di dunia. Visi dan misi yang diajukan pada dasarnya menawarkan apa yang menjadi niat semangat dinamika, impian dan kebutuhan masa depan baru makassar dua kali tambah baik.

Selain itu merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Kota Makassar yang telah ditetapkan termasuk masukan dari masyarakat. Disinilah diperlukan pemimpin yang visioner, merakyat serta mempunyai akar yang kuat terhadap budaya lokal yang tumbuh ditengah masyarakat. dalam visi, dituangkan tiga pokok pikiran yang secara konseptual diarahkan pada aspek kesejahteraan masyarakat serta tata kelola kota yang nyaman dan penciptaan tata pemerintahan yang baik dengan penerapan pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi. kota dunia

dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan inklusif yang berdaya tarik tinggi atau memukau dalam banyak hal. Diantaranya, potensi sumber daya alam dan infrastruktur sosial ekonomi yang ditandai karakter masyarakat yang inklusif. "nyaman dimaksudkan adalah mewujudkan proses pembangunan yang semakin menyempitkan kesenjangan dan kemandirian secara stabil dengan tumbuhnya tatanan sosial kemasyarakatan mengedepankan prinsip masyarakat yang sejahtera. sementara untuk semua adalah pemanfaatan pembangunan untuk dinikmati semua lapisan masyarakat.

Tiga misi utama Walikota Ramdhan untuk warga Kota Makassar, yakni merekonstruksi kehidupan rakyat untuk menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia, serta mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas bebas korupsi. ketiga misi tersebut memiliki 8 titik konsentrasi 'delapan jalan masa depan'.

1. Masyarakat Sejahtera Standar Dunia:

- a) Menuju bebas pengangguran
- b) Jaminan sosial keluarga serba guna untuk semua
- c) Pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam
- d) Deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah
- e) Sampah kita dia tukar beras
- f) Training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan
- g) Rumah kota murah untuk rakyat kecil

h) Hidup hijau dengan kebun kota

2. Kota Nyaman Kelas Dunia :

a) Atasi macet, banjir, sampah, dan masalah perkotaan lainnya

b) Bentuk badan pengendali pembangunan kota

c) Bangun waterfront city selamatkan pesisir dan pulau-pulau Makassar.

d) Bangun Sistem Transportasi Publik Kelas Dunia

e) Lengkapi Infrastruktur Kota Berkelas Dunia

f) Bangun Birringkanal Citu Dan Delapan Ikon Kota Baru Lainnya

g) Bangun Taman Temati

h) Tata Total Lorong

3. Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas Korupsi :

a) Menuju PAD Rp 1 Triliun

b) Insentif Progresif Semua Aparat Rt Dan Rw Rp 1 Juta Per Bulan

c) Kuota Anggaran Kelurahan Rp 2 Miliar Per Kelurahan Per Tahun

d) Pelayanan publik langsung ke rumah

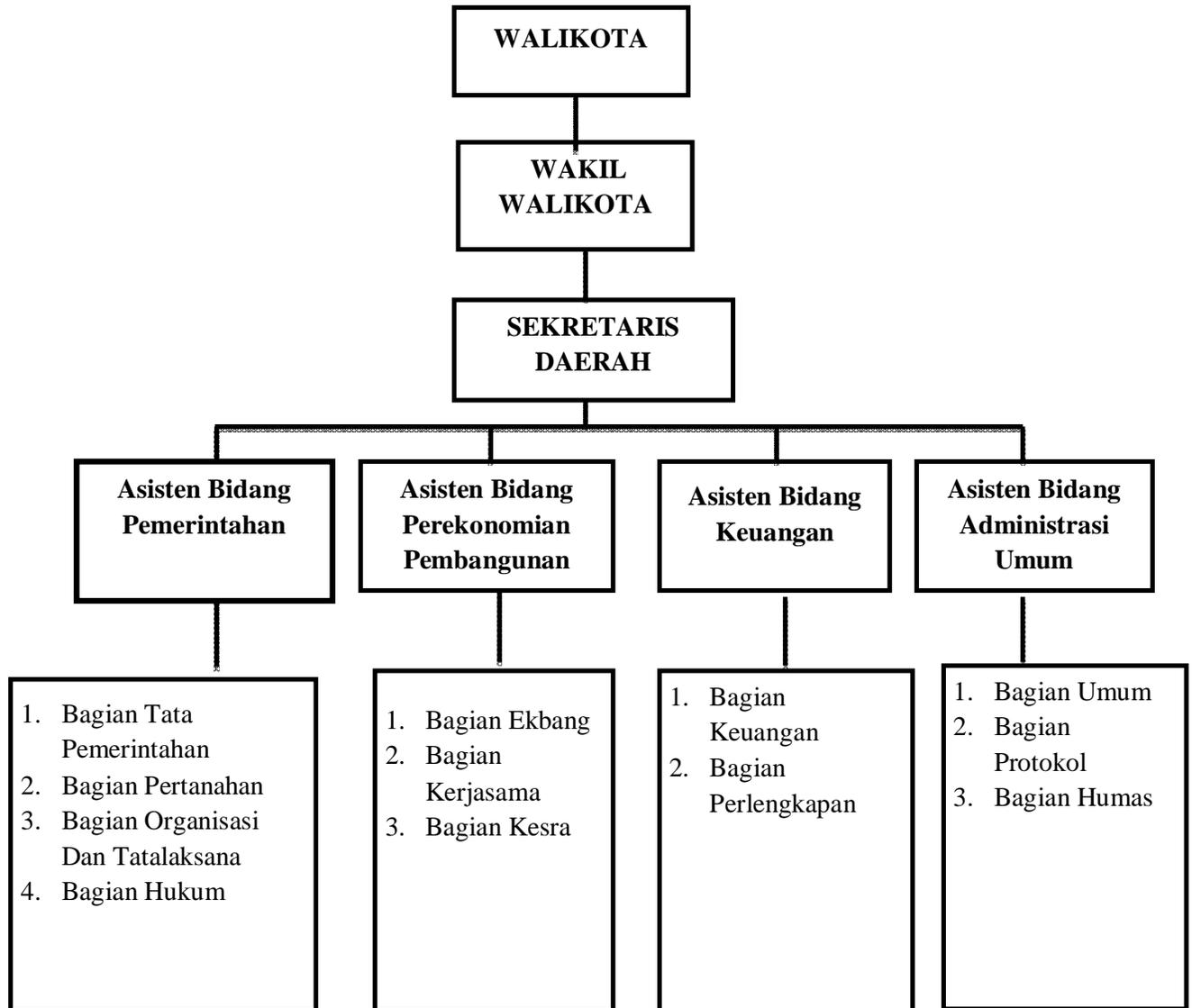
e) Fasilitas pelayanan publik terpusat terpadu di kecamatan

f) Pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu

g) Bebas bayar internet di ruang publik Kota 'Makassar Cyber City'

h) Bentuk Makassar Incorporate dan Bank Of Makassar

## STRUKTUR BAGAN KANTOR WALIKOTA MAKASSAR



## **B. Penerapan *Dynamic Governance* di Kecamatan Mariso Kota Makassar**

Peran pemerintah daerah di era otonomi daerah ini menjadi kian penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi, mengelola stabilitas sosial, dan menciptakan rasa aman. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut adalah tuntutan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih memiliki semangat kewirausahaan dengan sedikit mungkin menggunakan aturan dan kewenangan yang memaksa. Agar dapat menjalankan peran tersebut, diperlukan pemimpin yang jujur dan berintegritas, teruji (*capable*), memiliki pandangan yang luas (*visioner*), berani, dan dapat bekerja sama dengan semua pihak. Pemimpin ini yang dapat memengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk mau menciptakan budaya baru di pemerintahan. Budaya organisasi yang baik akan menjadi pondasi bagi tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka mewujudkan tujuan jangka panjang daerahnya.

Tata pemerintahan yang baik harus terus dinamis, agar mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, dan kemampuan untuk mengikuti beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut disebut *dynamic capabilities*. Disinilah penerapan konsep *dynamic governance* menemukan relevansi dan urgensinya.

Menurut pengamat tata kelola pemerintahan, Sarwono Kusumaatmadja, di Indonesia implementasi *dynamic governance* telah dilakukan oleh beberapa daerah dengan *dynamic leaders*-nya seperti Kota Surabaya melalui Tri Rismaharini, Kota Tarakan dengan Walikotanya Jusuf SK, Kota Bandung dengan Ridwan Kamil, dan Kabupaten Bantaeng dengan Bupati Nurdin Abdullah.

Mereka-mereka yang telah menjadi *dynamic leaders* telah mampu membawa penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakatnya melalui penerapan konsep-konsep pemerintahan yang dinamis (*dynamic governance*).

Terkait dengan perubahan sebagai esensi dasar *dynamic governance*, maka dua elemen *dynamic governance* menurut Boon, dan Geraldine adalah :

Pertama, budaya organisasi pemerintah, meliputi : integritas (*integrity*), tidak dapat disuap/tidak korupsi (*incorruptibility*), berdasar bakat dan kemampuan/prestasi (*meritocracy*), orientasi pasar yang berkeadilan (*market*), mudah menyesuaikan/lebih berorientasi pada pencapaian tujuan negara daripada berkuat pada soal ideology (*pragmatism*), berbagai etnik dan kepercayaan (*multi-racialism*), termasuk juga dalam budaya adalah : aktivitas negara (*state activism*), rencana dan tujuan jangka panjang (*long-term*), kebijakan sesuai kehendak masyarakat (*relevance*), pertumbuhan (*growth*), stabilitas (*stability*), bijaksana (*prudence*), dan mandiri (*self-reliance*).

Kedua, kemampuan yang dinamis, meliputi : *thinking ahead* (berpikir kedepan), *thinking again* (mengkaji ulang), dan *thinking across* (belajar dari pengalaman negara/organisasi lain).

### **1. *Thinking Ahead* ( Berfikir Kedepan)**

merupakan kemampuan mengidentifikasi faktor lingkungan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang, memahami dampaknya terhadap sosial-ekonomi masyarakat, mengidentifikasi pilihan-pilihan investasi yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan kesempatan

baru dan menghindari potensi ancaman yang dapat menghambat kemajuan masyarakat. Berfikir kedepan ini akan mendorong institusi pemerintah menilai dan meninjau kembali kebijakan dan strategi sedang berjalan, memperbaharui target dan tujuan, dan menyusun konsep baru kebijakan yang dipersiapkan menyongsong masa depan.

**a. Mengubah Kecamatan Mariso menjadi lebih baik**

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait mengubah wajah pemerintah menjadi lebih baik, maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Asisten Pemerintahan di kantor Balaikota Makassar yang mengatakan bahwa:

“...Untuk mengubah Kecamatan Mariso kota Makassar menjadi lebih baik sebagaimana yang disampaikan oleh Walikota Makassar melalui visi-misinya maka pemerintah kota ingin mewujudkan Kecamatan Mariso kota Makassar sebagai Kecamatan yang nyaman untuk semua, melalui program-program layanan inovasi yang dicanankan oleh pemerintah kota Makassar” (Wawancara, H.S Tanggal 19 April, 2017)

Hasil wawancara juga yang sama diutarakan oleh kepala Dinas Tata Ruang Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“...Memang benar Pemkot Makassar telah bekerjasama dengan beberapa SKPD (satuan perangkat daerah untuk mewujudkan kota Makassar sebagai kota dunia yang nyaman untuk semua. Akan tetapi ada beberapa roram inovasi Pemkot yang dianggap masih belum terlaksana dengan baik. Seperti proram makassar tidak rantas (MTR), program liat sampah ambil (LISA). Dan masih banyak lagi program-program layanan inovasi yang belum terlerealisasikan dengan baik

dan itu yang merupakan tantangan terbesar bagi SKPD agar bisa mengubah mindset masyarakat kota Makassar”. (Wawancara, A.K. Tanggal 17 April 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kecamatan Mariso yang mengatakan bahwa:

“...Akan tetapi ada beberapa program inovasi Pemkot yang dianggap masih belum terlaksana dengan baik. Seperti proram makassar tidak rantas (MTR), program liat sampah ambil (LISA). Dan masih banyak lagi program-program layanan inovasi yang belum terlerealisasikan dengan baik dan itu yang merupakan tantangan terbesar bagi SKPD agar bisa mengubah mindset masyarakat Kecamatan Mariso kota Makassar”. Disamping itu juga diperlukan partisipasi masyarakat agar mau bekerjasama dalam menjalankan setiap program yang ada(Wawancara, H.R, Tanggal 03 Juli 2017)

Pernyataan diatas di perkuat oleh pemerintah di bidang pertamanan dan kebersihan yang mengatakan bahwa yaitu:

“...terkait mengenai inovasi pemerintah di bidang kebersihan pemerintah telah mengeluarkan inovasi yaitu *Smart city* yang dapat di gunakan sebagai salah satu media teknologi. umpama ada tumpukan sampah disalah satu kecamatan itu, baik pihak dinas maupun masyarakat itu sendiri langsung melapor melalui medsos (Wawancara, H.I, Tanggal 03 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengubah Kecamatan Mariso kota Makassar menjadi lebih baik dengan mengupayakan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Mariso kota Makassar maka perlu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam merumuskan setiap kebijakan.

#### **b. Mampu menyesuaikan diri demi tercapainya tujuan**

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait mampukah pemerintah menyesuaikan diri melalui

program-program layanan yang diberikan demi tercapainya tujuan yang diharapkan, maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Asisten Pemerintahan di kantor Balaikota Makassar yang mengatakan bahwa:

“...Tidak mudah untuk menyesuaikan diri ada beberapa kendala yang dihadapi untuk melaksanakan setiap program-program layanan tersebut. Tetapi itu bukanlah masalah yang besar”. (Wawancara, H.S, Tanggal 19 April 2017)

Hasil wawancara juga yang sama diutarakan oleh kepala Dinas Tata Ruang Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“...Banyak program inovasi yang dicanakan oleh pemerintah kota Makassar akan tetapi ada beberapa inovasi yang dianggap kurang tepat untuk diterapkan di kota Makassar ini sehingga memerlukan waktu yang lumayan cukup lama untuk bisa dijalankan dengan baik”. (Wawancara, A.K. Tanggal 17 April 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kecamatan Mariso yang mengatakan bahwa:

“...Pemerintah kesulitan dalam menyesuaikan diri menyangkut program-program layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kadangkala ada program yang kurang tepat sasaran sehingga membuat sebagian masyarakat ada yang mengeluh. Salah satunya adalah program layanan kartu Indonesia sehat (KIS) ada sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia sehat (KIS). Akibatnya berimbas kepada kami banyak warga datang untuk meminta penjelasa”. (Wawancara, H.R, Tanggal 03 Juli 2017)

Hal yang sama yang disampaikan oleh masyarakat di Kecamatan Mariso yang mengatakan bahwa:

“...Kami merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang kurang baik memperhatikan masyarakatnya yang dimana seharusnya masyarakat yang kurang mampu menjadi sasaran dari program layanannya. Malah sebagian saja yang terdaftar. (Wawancara, R, Tanggal 03 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menyesuaikan diri dari berbagai program layanan yang dikeluarkan Walikota Makassar, ada beberapa cara yang dapat ditempuh pemerintah Kecamatan Mariso kota Makassar dalam menjalankan roda pemerintahan dengan dinamik perubahan lingkungan diperlukan berbagai perubahan baik aspek perencanaan maupun implementasinya. Perencanaan dan implementasi harus adaptif dengan besar kecilnya ketidakmenentuan masa depan lingkungan global.

### **c. Mampu memberikan pelayanan**

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Makassar, maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Kecamatan Mariso yang mengatakan bahwa:

“....Mengenai pemberian layanan kepada masyarakat Mariso kami menganggap telah memberikan layanan yang sudah maksimal, mulai dari pelayanan KTP, KK, surat izin menikah, surat izin usaha, dan lain-lain sebagai. Bahka apabila ada program Walikota keluarkan segera kami sampaikan melalui Kelurahan”. (Wawancara, H.R, Tanggal 03 Juli 2017)

Hal yang sama yang disampaikan oleh masyarakat di Kecamatan Mariso yang mengatakan bahwa:

“...Setiap program layanan yang Walikota keluarkan sampai pada masyarakatnya, dan yang menyampaikan adalah pihak Kelurahan. Dibantu dengan RT/RW setempat”. (Wawancara B.M, Tanggal 03 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap pemberian pelayanan publik harus mampu untuk mengadaptasi kebijakan agar mampu mengubah keadaan dan berimprovisasi dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru bagi masyarakat Kecamatan Mariso kota Makassar.

## **2. *Thanking Again ( Meninjau Kembali)***

*Thinking Again* merupakan kemampuan meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan. Apakah hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi, dan program telah memenuhi harapan banyak pihak atau perlu didesain ulang untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik. Kerangka waktu melakukan kaji ulang mulai dari kondisi yang sekarang dihadapi sampai masa waktu berlakunya kebijakan, strategi, dan program, dengan membandingkan apa yang dicapai dengan apa yang diinginkan. Kaji ulang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah terjadi mencakup pemanfaatan data, informasi-informasi baru, ukuran /standar yg telah ditentukan, warisan masalah dari suatu kebijakan atau program, dan umpan balik yang diterima.

### **a. Menentukan visi dan misi**

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait menentukan visi dan misi kota Makassar, maka

diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Asisten Pemerintahan di kantor Balaikota Makassar yang mengatakan bahwa:

“...Terkait visi dan misi bapak Walikota Makassar yaitu mengubah wajah kota Makassar menjadi kota dunia yang nyaman bagi semua, bukanlah wacana saja. Terbukti dengan berbagai penghargaan yang bapak Walikota dapatkan dari wakil Preiden Jusuf Kalla. Melalui setiap program inovasi yang diberikannya demi mengubah masyarakat menjadi lebih baik lagi”. (Wawancara, H.S Tanggal 19 April, 2017)

Hasil wawancara juga yang sama diutarakan oleh kepala Dinas Tata Ruang Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“...Pelaksanaan dari visi-misi pemerintah tidak akan terlepas dari yang namanya satuan perangkat kerja daerah (SKPD ) mereka inilah yang akan membantu dalam setiap pelaksanaan inovasi yang ada”. (Wawancara, A.K. Tanggal 17 April 2017)

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Kecamatan Mariso yang mengatakan bahwa:

“...Mengenai pemberian layanan kepada masyarakat Mariso kami menganggap telah memberikan layanan yang sudah maksimal, mulai dari pelayanan KTP, KK, surat izin menikah, surat izin usaha, dan lain-lain sebagai. Bahka apabila ada program Walikota keluarkan segera kami sampaikan melalui Kelurahan”. (Wawancara, H.R, Tanggal 03 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Makassar telah semaksimal mungkin memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya, serta dalam setiap menjalankan inovasinya

pemerintah dibantu oleh (SKPD)-nya bekerjasama dalam mewujudkan visi-misi kota dunia yang nyaman untuk semua.

#### **b. Kemampuan mengevaluasi kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait kemampuan pemerintah mengevaluasi kebijakan maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Asisten Pemerintahan di kantor Balaikota Makassar yang mengatakan bahwa:

“...Kami akan mengecek atau mengevaluasi kebijakan/inovasi yang dikeluarkan 2x sebulan dengan meninjau langsung kesetiap Kecamatan yang ada di kota Makassar . (Wawancara, H.S Tanggal 19 April, 2017)

Hasil wawancara juga yang sama diutarakan oleh kepala Dinas Tata Ruang Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“...Sebenarnya belum ada perda yang kuat dalam mengatur kebijakan program inovasi pemerintah. Hanya saja, pemerintah mengambil acuan dari Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Nomor 5 tahun 2014 tentang Kota Makassar yang Nyaman Untuk Semua”. (Wawancara, A.K. Tanggal 17 April 2017)

Pernyataan yang kuat juga disampaikan oleh Kepala Kecamatan Mariso yang mengatakan bahwa:

“...Setiap 2x sebulan bapak walikota bersama jajarannya meninjau langsung lokasi. Dengan anggapan apakah inovasi yang dikeluarkannya telah maksimal dan tepat sasarannya”. (Wawancara, H.R, Tanggal 03 Juli 2017).

Pernyataan diatas di perkuat oleh pemerintah di bidang pertamanan dan kebersihan yang mengatakan bahwa yaitu:

“...Bapak walikota sering melakukan tinjauan langsung kelokasi dengan memantau perkembangan dari programnya. Kadang juga pemerintah mengecek melalui aplikasi media sosialnya setiap aduan atau saran yang masuk (Wawancara, H.I, Tanggal 03 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk menerapkan *Dynamic Governance* diKecamatan Mariso kota Makassar sebagaimana yang telah dilakukan oleh kota-kota lainnya tidak menutup kemungkinanKecamatan Mariso kota Makassar juga mampu menerapkan Dynamik Governance, melalui evaluasi dan perkembangan program yang telah di tinjau langsung oleh Wali Kota beserta staf dan jajaranya demi tercapainya tujuan program kota Makassar yang di Kecamatan Mariso

### **c. Meninjau kembali kebijakan inovasi**

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait meninjau kembali kebijakan inovasi maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Asisten Pemerintahan di kantor Balaikota Makassar yang mengatakan bahwa:

“...Belum ada perda yang mengatur mengenai oleh kebijakan inovasi yang dicanamkan oleh pemerintah kota Makassar. Untuk itu pemerintah hanya berpedoman pada perda nomor 5 tahun 2014.

Melalui perda inilah visi dan misi kota Makassar akan dilaksanakan. (Wawancara, H.S Tanggal 19 April, 2017)

Pernyataan yang kuat juga diutarakan oleh kepala Dinas Tata Ruang Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“...Selama ini pemerintah hanya menggunakan Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Nomor 5 tahun 2014 tentang Kota Makassar yang Nyaman Untuk Semua sebagai titik acuan dalam menjalankan program inovasinya. Hal ini dikarenakan belum adanya perda yang mengatur setiap inovasi yang telah terlaksana”. (Wawancara, A.K. Tanggal 17 April 2017)

Hal senda juga disampaikan oleh Kepala Kecamatan Mariso yang mengatakan bahwa:

“...Pemerintah perlu kembali meninjau kebijakan yang ada sebab menurut saya masih ada beberapa inovasi yang tidak sesuai diterapkan di Makassar”. (Wawancara, H.R, Tanggal 03 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kecamatan Mariso kota Makassar perlu meninjau kembali kebijakan inovasi yang di keluarkannya karena belum adanya perda yang mengatur setiap inovasi yang telah terlaksana sehingga masih ada beberapa program inovasi yang masih kurang maksimal penerapannya seperti visi dan misi yang ada di Kecamatan Mariso kota Makassar.

### **C. Fakto yang mempengaruhi dalam penerapan *Dynamika Governance* di Kecamatan Mariso Kota Makassar.**

#### **1. Sumber daya manusia (SDM)**

Pengembangan Sumber Daya merupakan barang publik atau sebagai hak-hak sosial yang dijamin oleh pemerintah. Pendidikan adalah merupakan variabel yang menentukan kualitas SDM suatu bangsa. Maka tanggung jawab

pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Beragam masalahpun muncul dalam Penerapan *Dynamik Governance* di Kecamatan Mariso Kota Makassar salah satunya, yaitu minimnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Penerapan *Dynamik Governance*.

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait dengan sumberdaya manusia (SDM), maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Asisten Pemerintahan di kantor Balaikota Makassar yang mengatakan bahwa:

“...SKPD secara umum belum maksimal bahkan minimal mungkin karena mereka kan disuguhkan dengan kegiatan-kegiatan sendiri, ada beberapa SKPD yang masih bingung dukungan seperti apa diberikan ke kecamatan atau lurah karena itu masih sesuatu sangat baru.” (Wawancara, H.S Tanggal 19 April, 2017)

Hasil wawancara juga yang sama diutarakan oleh kepala Dinas Tata Ruang Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“... Kendalanya saya kira masalah SDM-nya karena masih banyak SKPD yang kurang paham mengenai berbagai kebijakan pemerintah kota Makassar”. (Wawancara, A.K. Tanggal 17 April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Masyarakat kurang berpartisipasi terhadap Penerapan *Dynamik Governance*. Ini di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap berbagai kebijakan maupun program pemerintah Kecamatan Mariso kota Makassar terutama dalam

membersihkan lingkungan. Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai macam sosialisasi, tapi sebagian masyarakat di Kecamatan Mariso kota Makassar kurang menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan.

## **2. Kurangnya Partisipasi masyarakat Kecamatan Mariso Kota Makassar**

Beragam masalahpun muncul dalam pelaksanaan *Smart City*, salah satunya, yaitu minimnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penerapan *dynamica Governance* karena kurangnya pengetahuan SKPD tentang program ini. Dilain pihak kurangnya partisipasi masyarakat kota makassar untuk bisa membantu demi terselenggaranya atau tercapainya visi misi pemerintah kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait kurangnya partisipasi masyarakat kota makassar maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Asisten Pemerintahan di kantor Balaikota Makassar yang mengatakan bahwa:

“...Beragam sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah kota Makassar mulai dari pemasangan spanduk, media sosial maupun radio, akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat kota Makassar masih kurang. Biarpun pemerintah berupaya mengeluarkan berbagai macam inovasi demi terciptanya kota kota Makassar yang nyam tetap saja akan kurang berjalan dengan maksimal. jika masyarakatnya tidak ikut berpartisipasi di dalamnya. Seperti salah satu program pemerintah yaitu MTR, LISA diharapkan masyarakat tidak lagi membuang sampah di sembarangan tempat lagi” (Wawancara, H.S Tanggal 19 April, 2017)

Pernyataan yang kuat juga disampaikan oleh Kepala Kecamatan

Mariso yang mengatakan bahwa:

“....Masih ada masyarakat yang tetap saja kurang menyadari akan kebersihan kota kita. Tetap saja ada sebagian dari mereka yang membuang sampah di kanal dekat pasar ikan, eskipun lurah setempat telah memasang spantuk tapi tetap saja mereka membuang sampahnya. (Wawancara, H.R, Tanggal 03 Juli 2017)

Hal yang sama yang disampaikan oleh masyarakat di Kecamatan

Mariso yang mengatakan bahwa:

“...Masih ada beberapa masyarakat yang kurang menjaga kebersihan lingkunganya dengan tetap membuang sampah di kanal dan digot-got meskipun sudah disediakan tepat sampah”. (Wawancara B.M, Tanggal 03 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Masyarakat kurang berpartisipasi terhadap Penerapan dynamik Governance. Ini dikarenakan kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap berbagai kebijakan Maupun program pemerintah Kecamatan Mariso kota Makassar terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai macam sosialisasi, tapi sebagian masyarakat di Kecamatan Mariso kota Makassar kurang menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penerapan *Dynamik Governance* di Kecamatan Mariso Kota Makassar yaitu:

1. Thinking Ahead yang merupakan kemampuan untuk menganalisa kondisi dimasa depan yang penuh dengan ketidakpastian dan melihat peluang-peluang baru dan potensi ancaman yang ada. Melalui program-program layan serta kebijakan yang dikeluarkannya. Yang dimana meliputi:
  - a. Mengubah wajah pemerintah menjadi lebih baik seperti melalui visi-misinya pemerintah kota ingin mewujudkan kota Makassar sebagai kota dunia yang nyaman untuk semua,.
  - b. Mampu menyesuaikan diri demi tercapainya tujuan yaitu seperti penerapan *smart city*, dan penerapan makassar tidak rantasa, mmasih belum sesuai diterapkan di kota Makassar serta kartu *smart*, kartu kis, kartu indonesia pintar, dan lain-lain yang jugakurang tetap sasarannya.
  - c. Mampu memberikan layanan artinya setiap layanan puskesmas keliling, dan lain-lainnya lumayan sudah memberikan dampak yang positif oleh masyarakat.
  - d. Menentukan visi-misi yaitu terkait, untuk itu diperlukan beberapa satuan perangkat daerah (SKPD) yang ikut terlibat dalam pelaksanaan penerapan *dynamic governance* di Kecamatan Mariso kota Makassar.



2. Perlu di adakan pelatihan tambahan kepada setiap SKPD yang terkait sehingga membuat mereka lebih paham lagi mengenai setiap program – program kebijakan yang di keluarkan Kecamatan Mariso Kota Makassar.
3. Pemerintah harus tegas agar masyarakat ikut berperan aktif dalam menjalankan Dynamic Governance di Kecamatan Mariso demi tercapainya kebijakan dan program inovasi yang di keluarkan oleh pemerintah Kecamatan Mariso kota Makassar terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan .

## Daftar Pustaka

- Andrew Tan et.al. 2004. "*Principle of Governance: Preserving Ours Fundamentals, Preparing for the Future*". *Special study report prepared by a group of Administratif Officers*. Singapore.
- Boon Siong Neo, Geraldine Chen. 2007. *Dynamic Governance, Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. World Scientific Publishing Co. Pte.Ltd.
- Joseph Nye.2004). "Government, Governance, and Accountability" *Ethos*.Civil Service College.
- Kaufmann Daniel, AartKraay, dan Massimo Mastruzzi (2004). *Governance Matters III; Governance Indicators for 1996, 1998, 2000 and 2002,*" *World Bank Economic Review*. Vol 18.
- Kooiman, Jan. 2007. *Governing as Governance*. SAGE Publication India Pvt Ltd.
- Leopald, Davis And Marc stear (editor).2008. *Politycal Teori, Methodes amd approches*. Oxf ord university press Inc.NEW york
- Lewis, Carol W and Stuart C. Gilman (2005) *The Ethic Challenge in Public Service*(second edition). JOSSEY-BASS USA.
- Nugroho, Riant. 2003. *Public Policy*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2003. *.Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Evaluasi* .Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Perry, James L and Annie Hondeghem. 2008. *Motivation In public Management. The call of public servies*.Ox ford university press inc.New York
- Samudra Wibawa, 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiono, 2012.*MetodePenelitianKombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.
- Scolichin Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Scolichin Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Tachjan, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung.Penerbit AIPIBandung.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



## **Wawancara Penelitian: Penerapan *Dynamic Governance* di kota Makassar**

---

### **I. Kata Pengantar**

Dengan Hormat

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir atau skripsi yang sedang saya lakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, maka saya melakukan penelitian dengan judul “Penerapan *Dynamic Governance* di kota Makassar”. Wawancara ini disampaikan dengan hormat kepada bapak Walikota Makassar dan mahasiswa dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang Penerapan *Dynamic Governance* di kota Makassar yang dibuat dengan sebaik – baiknya dan dengan sejujur – jujur nya.

### **II. IDENTITAS PENELITI**

Nama : Muhammad Akbar

NIM : 105640153411

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

### **III. IDENTITAS INFORMAN**

Nomor Informan : 1

Nama : Drs. H. Sabri, M,Si

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Asisten dibidang pemerintahan

#### Pertanyaan

1. Apa dalam menerapkan dinamika governance dikaitkan dengan visi-misi kota makassar?
2. Adakah strategi yang dilakukan dalam mewujudkan dinamika governance ini melalui visi-misi kota makassa?
3. Bagaimana dengan kemampuan instansi atau SKPD dalam menerapkan dinamika governance?
4. Upayah apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengubah wajah kota makassar menjadi lebih baik?
5. Mampukah pemerintah menyesuaikan diri dalam menerapkan dinamika governance dapat terwujud dikota makassar?
6. Apakah ada faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan dinamika governance?

#### **IV. IDENTITAS INFORMAN**

Nomor Informan : 2

Nama : Drs. Ahmad Kafrawi M.Si

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Kepala Dinas Tata Ruang

#### Pertanyaan

1. Menurut bapak apakah setiap program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota makassar mampu merubah wajah kota makassar dengan baik atau tidak?
2. Menurut bapak apakah penerapan dinamika governance ini mampu menata perkotaan dikota makassar yang sembrabutdan tidak tertata dengan baik?
3. Menurut bapak apakah setiap SKPD yang terkait mampu menjalankan program-program yang ada?

## V. IDENTITAS INFORMAN

Nomor Informan : 3  
Nama : Harum Rani SE,MM  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Umur : 39 Tahun  
Pekerjaan : Camat Mariso

### Pertanyaan

1. Program-program apa saja yang sudah direalisasikan oleh pemerintah kota makassar?
2. Bagaimana cara pemerintah kota mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah dijalankan?
3. Apakah setiap warga mariso sudah dapat merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang di keluarkan?